

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, berawal dari runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pecahnya Uni Soviet menyebabkan terbentuknya negara-negara baru yang sebelumnya merupakan republik di bawah naungan Uni Soviet, termasuk Rusia dan Ukraina (Tsygankov, 2016). Peristiwa ini menandai awal dari pergeseran kekuatan politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Rusia, sebagai penerus utama Uni Soviet, berupaya untuk mempertahankan pengaruh dan kekuatannya di wilayah bekas Uni Soviet, sementara Ukraina dan negara-negara lainnya berusaha untuk membangun identitas dan kedaulatan mereka sendiri (Mankoff, 2016).

Salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika hubungan antara Rusia dan Ukraina adalah sumber daya energi, terutama gas alam. Rusia merupakan produsen dan eksportir gas alam terbesar di dunia, sementara Ukraina bergantung pada impor gas alam dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan energinya (Pirani et al., 2009). Ketergantungan ini menciptakan ketegangan politik dan ekonomi antara kedua negara, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai harga dan transit gas. Konflik gas pertama antara Rusia dan Ukraina terjadi pada tahun 2006, ketika Rusia memutuskan pasokan gas ke Ukraina karena perselisihan harga (Balmaceda, 2013). Pada saat itu, Rusia menuntut Ukraina untuk membayar harga gas yang lebih tinggi, sesuai dengan harga pasar

internasional. Sebelumnya, Ukraina menikmati harga gas yang lebih rendah sebagai negara bekas Uni Soviet. Namun, Ukraina menolak tuntutan tersebut, yang kemudian memicu Rusia untuk memutuskan pasokan gasnya ke Ukraina (Pirani et al., 2009). Konflik ini berlangsung selama beberapa minggu dan menyebabkan gangguan pasokan gas di Ukraina serta beberapa negara Eropa lainnya yang mendapat pasokan gas melalui jalur transit Ukraina.

Konflik serupa terjadi kembali pada tahun 2009, yang menyebabkan gangguan pasokan gas tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di beberapa negara Eropa lainnya (Pirani et al., 2009). Kali ini, perselisihan terjadi karena Rusia menuntut Ukraina untuk membayar utang gas yang belum terbayar, sementara Ukraina menolak tuntutan tersebut (Pirani et al., 2009). Konflik ini berlangsung lebih lama dari konflik sebelumnya dan baru terselesaikan setelah beberapa pekan dengan intervensi dari Uni Eropa. Konflik gas antara Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi negara-negara Eropa yang bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Beberapa negara Eropa mengalami kekurangan pasokan gas selama konflik berlangsung (Pirani et al., 2009). Hal ini menunjukkan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki implikasi yang lebih luas bagi kawasan Eropa.

Selain itu, pembentukan GUAM (Georgia, Ukraina, Azerbaijan, dan Moldova) pada tahun 1997 juga memberikan pengaruh signifikan terhadap hubungan Rusia dan Ukraina. GUAM dianggap sebagai aliansi

yang menentang dominasi Rusia di kawasan tersebut dan berusaha untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan politik di luar pengaruh Rusia (Mankoff, 2016). GUAM dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan demokrasi, membangun hubungan ekonomi yang lebih erat, dan meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan. Meskipun organisasi ini tidak terlalu efektif dalam praktiknya, namun keberadaannya menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia dan mencari alternatif kerjasama di luar lingkup negara-negara bekas Uni Soviet (Mankoff, 2016).

Pembentukan GUAM juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh Rusia dalam organisasi lain yang didominasi oleh negara-negara bekas Uni Soviet, seperti Komunitas Negara-Negara Merdeka (*Commonwealth of Independent States* atau CIS). CIS dianggap sebagai organisasi yang dikendalikan oleh Rusia, sehingga GUAM muncul sebagai alternatif bagi negara-negara yang ingin membangun hubungan yang lebih mandiri (Mankoff, 2016).

Di sisi lain, Ukraina juga gencar memperkuat hubungan kerjasama dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dalam bidang pertahanan dan keamanan. Upaya ini dilihat oleh Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya di kawasan tersebut (Pifer, 2009). Rusia khawatir bahwa semakin dekatnya hubungan Ukraina dengan NATO dapat membahayakan posisi Rusia sebagai kekuatan regional yang dominan. Ukraina telah menyuarakan keinginannya untuk bergabung dengan NATO

sejak awal 2000-an. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan Ukraina untuk memperkuat keamanan nasionalnya dan menjauhkan diri dari pengaruh Rusia. Namun, Rusia menganggap upaya ini sebagai ancaman langsung terhadap kepentingannya di kawasan tersebut (Tsygankov, 2016).

Rusia khawatir bahwa jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka Aliansi tersebut akan memiliki basis militer yang dekat dengan perbatasan Rusia, yang dapat digunakan untuk mengawasi atau bahkan menyerang Rusia (Tsygankov, 2016). Selain itu, Rusia juga khawatir kehilangan pengaruhnya di Ukraina, yang merupakan negara bekas Uni Soviet yang strategis secara geografis dan memiliki sejarah yang erat dengan Rusia. Upaya Ukraina untuk mendekatkan diri dengan NATO telah memicu reaksi keras dari Rusia, yang berusaha untuk mencegah hal tersebut terjadi (D'Anieri, 2018). Rusia telah menggunakan berbagai cara, termasuk ancaman militer, sanksi ekonomi, dan propaganda, untuk menentang upaya Ukraina tersebut (Sakwa, 2014).

Sikap Rusia yang menentang upaya Ukraina untuk mendekatkan diri dengan NATO juga dipengaruhi oleh persepsi Rusia bahwa NATO telah melanggar janjinya untuk tidak melakukan ekspansi ke wilayah bekas Uni Soviet setelah Perang Dingin berakhir (Sakwa, 2014). Rusia merasa bahwa NATO telah mengkhianati kesepakatan tersebut dengan menerima negara-negara Eropa Timur dan bekas republik Soviet sebagai anggota baru (Tsygankov, 2016). Perluasan keanggotaan NATO ke wilayah bekas Uni Soviet dianggap Rusia sebagai ancaman langsung

terhadap keamanan nasionalnya. Rusia khawatir bahwa semakin banyak negara bekas Uni Soviet yang bergabung dengan NATO, maka lingkaran Aliansi tersebut akan semakin mengepung Rusia dan membatasi ruang gerak Rusia di kawasan tersebut (Tsygankov, 2016).

Selain itu, Rusia juga merasa bahwa ekspansi NATO ke wilayah bekas Uni Soviet merupakan upaya untuk menciptakan "zona penyangga" (*buffer zone*) di sekitar Rusia, yang bertujuan untuk mengontrol dan membatasi pengaruh Rusia di kawasan tersebut (Tsygankov, 2016). Hal ini dianggap Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis dan status Rusia sebagai kekuatan regional yang dominan. Upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO juga dipengaruhi oleh faktor internal di Ukraina sendiri. Setelah Revolusi Oranye pada tahun 2004, pemerintahan baru di Ukraina yang dipimpin oleh Viktor Yushchenko lebih condong ke arah integrasi dengan Barat dan mengambil jarak dari Rusia (Tsygankov, 2016). Pemerintahan Yushchenko melihat NATO sebagai jaminan keamanan dari ancaman Rusia dan sebagai langkah menuju integrasi dengan komunitas Barat (Tsygankov, 2016).

Namun, upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO juga menghadapi tantangan dari dalam negeri sendiri. Sebagian masyarakat Ukraina, terutama di wilayah timur yang berbatasan dengan Rusia, merasa lebih dekat secara budaya dan ekonomi dengan Rusia (Tsygankov, 2016). Mereka khawatir bahwa bergabung dengan NATO dapat memperburuk hubungan dengan Rusia dan memicu konflik internal di Ukraina. Selain

itu, terdapat pula kelompok-kelompok pro-Rusia di Ukraina yang menentang upaya bergabung dengan NATO dan lebih mendukung hubungan yang erat dengan Rusia (Tsygankov, 2016). Kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh yang cukup kuat di beberapa wilayah Ukraina, terutama di Krimea dan wilayah timur lainnya.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan polarisasi yang terjadi di Ukraina antara kelompok yang pro-Barat dan pro-Rusia (Tsygankov, 2016). Polarisasi ini telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Ukraina dan memperumit upaya negara tersebut untuk bergabung dengan NATO atau organisasi Barat lainnya. Di sisi lain, Rusia juga berupaya untuk mempertahankan pengaruhnya di Ukraina melalui berbagai cara, baik politik, ekonomi, maupun militer. Salah satu langkah Rusia adalah dengan mendukung kelompok-kelompok pro-Rusia di Ukraina dan menggunakan pengaruh tersebut untuk menghalangi upaya Ukraina mendekatkan diri dengan Barat (Tsygankov, 2016).

Rusia juga menggunakan instrumen ekonomi, seperti perdagangan dan investasi, untuk mempertahankan pengaruhnya di Ukraina (Tsygankov, 2016). Ukraina sangat bergantung pada ekspor ke Rusia dan impor energi dari Rusia, sehingga Rusia dapat menggunakan *leverage* ekonomi ini untuk menekan Ukraina agar tidak terlalu mendekatkan diri dengan Barat (Tsygankov, 2016). Selain itu, Rusia juga tidak segan untuk menggunakan ancaman militer atau bahkan intervensi militer untuk melindungi kepentingannya di Ukraina. Hal ini terlihat dari aneksasi

Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan dukungan Rusia kepada kelompok separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina (Tsygankov, 2016). Tindakan Rusia ini memicu krisis terbesar dalam hubungan Rusia-Ukraina sejak runtuhnya Uni Soviet dan telah menyebabkan perpecahan *de facto* di Ukraina.

Krisis tersebut juga memperlihatkan bahwa Rusia bersedia menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan strategis seperti Ukraina (Tsygankov, 2016). Hal ini memperkuat persepsi bahwa Rusia menganggap Ukraina sebagai bagian dari "lingkaran keamanan" dan "zona pengaruh" Rusia yang tidak boleh dikuasai oleh kekuatan asing seperti NATO (Tsygankov, 2016). Situasi ini telah menciptakan ketegangan yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, serta memperumit upaya penyelesaian konflik di wilayah timur Ukraina. Kedua negara memiliki kepentingan strategis yang berbeda dan saling bertentangan di Ukraina, yang sulit untuk direkonsiliasi (Tsygankov, 2016).

Rusia menganggap Ukraina sebagai wilayah yang sangat penting bagi kepentingan keamanan dan pengaruhnya di kawasan tersebut, sementara Ukraina berusaha untuk membangun identitas nasional yang terpisah dari Rusia dan mendekatkan diri dengan Barat (Tsygankov, 2016). Perseteruan kepentingan ini telah menyebabkan konflik berkepanjangan yang tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga memiliki

implikasi yang lebih luas bagi stabilitas kawasan dan dinamika geopolitik global.

Konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi stabilitas kawasan dan dinamika geopolitik global. Konflik ini telah menjadi salah satu titik panas geopolitik yang dapat memicu ketegangan antara Rusia dengan Barat, khususnya Amerika Serikat dan NATO. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa telah memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada Ukraina dalam menghadapi tekanan dari Rusia (Tsygankov, 2016). Mereka menganggap tindakan Rusia di Ukraina sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta ancaman terhadap stabilitas regional (Tsygankov, 2016).

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan sejumlah sanksi ekonomi terhadap Rusia, yang meliputi pembatasan akses ke pasar keuangan, larangan ekspor teknologi sensitif, dan pembatasan aktivitas ekonomi bagi individu dan entitas tertentu yang terkait dengan krisis di Ukraina (Tsygankov, 2016). Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menekan Rusia agar mengubah sikap dan kebijakan terkait Ukraina. Namun, Rusia menganggap sanksi-sanksi tersebut sebagai campur tangan asing dalam urusan domestiknya dan telah membalas dengan memberlakukan sanksi balasan terhadap negara-negara Barat (Tsygankov, 2016). Hal ini telah memperkeruh ketegangan antara Rusia

dan Barat, serta menyebabkan perang sengit di bidang ekonomi dan diplomasi.

Selain itu, konflik di Ukraina juga telah memicu kekhawatiran akan munculnya kembali persaingan kekuatan besar (*great power rivalry*) antara Rusia dan Amerika Serikat, yang mirip dengan dinamika Perang Dingin (Tsygankov, 2016). Kedua negara adidaya tersebut berusaha untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di kawasan strategis seperti Ukraina, yang dapat memicu persaingan dan konfrontasi lebih lanjut (Tsygankov, 2016).

Konflik di Ukraina juga telah menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya konflik militer yang lebih besar antara Rusia dan NATO (Tsygankov, 2016). Kedua belah pihak telah meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut, dengan NATO memperkuat pasukannya di negara-negara Eropa Timur dan Rusia meningkatkan kekuatannya di wilayah perbatasan dengan Ukraina (Tsygankov, 2016). Meskipun kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan konflik militer terbuka, namun risiko insiden atau kesalahan perhitungan yang dapat memicu konfrontasi militer masih tetap ada (Tsygankov, 2016). Hal ini dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi keamanan regional dan global.

Selain itu, konflik di Ukraina juga telah memperlihatkan kelemahan institusi keamanan regional seperti Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) dalam menangani krisis semacam ini

(Tsygankov, 2016). OSCE, yang seharusnya berperan sebagai platform dialog dan resolusi konflik, ternyata tidak mampu mencegah eskalasi konflik dan mencapai penyelesaian yang efektif (Tsygankov, 2016). Kegagalan OSCE dalam menangani krisis di Ukraina menunjukkan bahwa organisasi regional tersebut masih memiliki keterbatasan dan perlu direformasi agar dapat lebih efektif dalam mengelola konflik dan menjaga stabilitas kawasan (Tsygankov, 2016).

Secara keseluruhan, konflik antara Rusia dan Ukraina telah menjadi salah satu tantangan geopolitik terbesar di abad ke-21. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut, tetapi juga memiliki implikasi yang jauh lebih luas bagi keamanan regional dan global. Konflik ini telah memperkeruh ketegangan antara Rusia dan Barat, memicu kekhawatiran akan munculnya persaingan kekuatan besar yang baru, serta mengungkap kelemahan institusi keamanan regional dalam menangani krisis semacam ini (Tsygankov, 2016). Penyelesaian konflik ini tidak hanya penting bagi Rusia dan Ukraina, tetapi juga bagi stabilitas kawasan dan tatanan global yang lebih luas.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini menganalisis Konsep Deterministik Realisme terhadap perbedaan kekuatan Rusia dan Ukraina dalam konflik 2022–2023, dengan fokus pada distribusi kekuatan militer (pengeluaran, nuklir, personel, dan kapabilitas tempur) serta pengaruhnya terhadap eskalasi dan de-eskalasi konflik. Selain itu, kajian ini mengeksplorasi bagaimana

persepsi kedua negara terhadap posisi dan kekuatan mereka dalam hirarki internasional memengaruhi strategi, tujuan, dan keberlanjutan konflik.

Adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis deterministik realisme menjelaskan pengaruh perbedaan kekuatan militer antara Rusia dan Ukraina terhadap strategi, tujuan dan keberlanjutan konflik?
2. Bagaimana interaksi antara institusi internasional, norma global, dan persepsi kekuatan Rusia serta Ukraina memengaruhi dimanika eskalasi dan de-eskalasi konflik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis deterministik realisme menjelaskan pengaruh perbedaan kekuatan militer antara Rusia dan Ukraina terhadap strategi, tujuan dan keberlanjutan konflik.
- b. Untuk mengetahui interaksi antara institusi internasional, norma global, dan persepsi kekuatan Rusia serta Ukraina memengaruhi dimanika eskalasi dan de-eskalasi konflik.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori neorealisme dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam konteks konflik kontemporer. Penelitian ini akan menguji relevansi konsep-konsep neorealisme seperti distribusi

kapabilitas dan *balance of power* dalam memahami dinamika konflik Rusia-Ukraina.

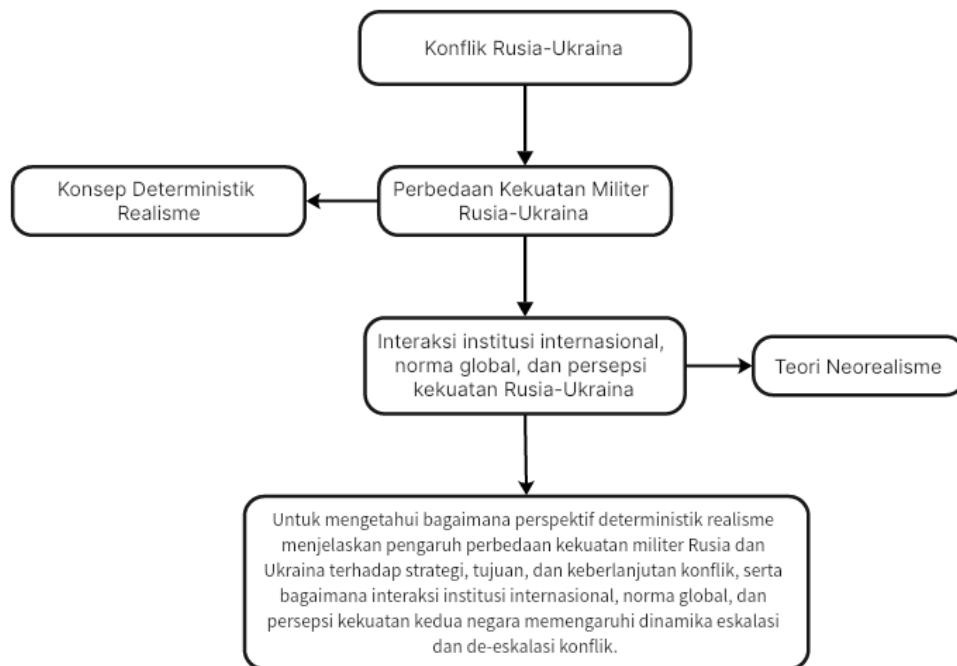
- 2) Memperkaya literatur akademik tentang peran anggaran belanja militer dalam konflik internasional. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perbedaan kapabilitas finansial militer dapat mempengaruhi keberlanjutan dan intensitas konflik.
- 3) Mengembangkan kerangka analitis untuk memahami hubungan antara anggaran belanja militer dan dinamika konflik internasional, yang dapat diaplikasikan pada studi kasus lain di masa depan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembuat kebijakan tentang pentingnya anggaran belanja militer dalam dinamika konflik internasional. Hal ini dapat membantu dalam perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan yang lebih efektif.
- 2) Menyediakan analisis yang dapat digunakan oleh organisasi internasional dan badan-badan perdamaian dalam upaya mediasi dan resolusi konflik. Pemahaman tentang perbedaan kapabilitas militer dapat membantu dalam merancang strategi negosiasi yang lebih efektif.

- 3) Memberikan wawasan bagi masyarakat umum tentang kompleksitas konflik Rusia-Ukraina, serta meningkatkan kesadaran publik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika konflik internasional.

D. Kerangka Konseptual



Tabel 1.1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber: Penulis

Berdasarkan bagan di atas, penelitian ini terdiri dari konsep-konsep yang tertata, yaitu paradigma, teori, dan pandangan ahli yang disarikan sebagaimana piramida terbalik. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, dimulai dari konsep yang paling umum hingga yang paling spesifik. Penelitian ini berlandaskan pada konsep deterministik realisme dan teori neorealisme dalam studi hubungan internasional.

Dalam Konsep Deterministik Realisme, kekuatan militer memang menjadi faktor utama yang menentukan kelangsungan dan keberhasilan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Rumusan masalah pertama hendak menganalisis bagaimana perbedaan kekuatan militer antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi persepsi mereka terhadap posisi dan kekuatan masing-masing dalam hirarki internasional. Analisis ini akan mengungkapkan bagaimana persepsi tersebut pada akhirnya mempengaruhi eskalasi atau de-eskalasi konflik dalam kerangka hirarki kekuatan internasional.

Selanjutnya, rumusan masalah kedua bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi antara institusi internasional, norma global, dan perbedaan kekuatan, khususnya persepsi Rusia dan Ukraina terhadap posisi masing-masing dalam hirarki internasional, mempengaruhi dinamika konflik, termasuk eskalasi atau de-eskalasinya, serta dampak persepsi tersebut terhadap strategi dan tujuan kedua negara, yang pada akhirnya menentukan durasi dan potensi penyelesaian konflik di masa depan.

Pemaparan rinci mengenai kerangka konseptual penelitian ini akan mencakup kutipan teori dan pendapat para ahli yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung analisis serta membantu dalam penyelesaian penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teori Neorealisme

Neorealisme, juga dikenal sebagai realisme struktural, adalah teori hubungan internasional yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz. Teori ini merupakan perkembangan dari teori realisme klasik dan berfokus pada struktur sistem internasional sebagai faktor utama yang mempengaruhi perilaku negara.

Kenneth Waltz, dalam karyanya yang berpengaruh "*Theory of International Politics*" (1979), mengembangkan teori neorealisme sebagai respons terhadap kritik terhadap realisme klasik. Waltz berpendapat bahwa untuk memahami politik internasional, kita perlu fokus pada struktur sistem internasional, bukan pada sifat manusia atau karakteristik internal negara.

Beberapa poin kunci dari pemikiran Waltz dalam neorealisme adalah:

- a. Struktur Sistem Internasional: Waltz menekankan bahwa struktur sistem internasional yang anarki (tidak adanya otoritas sentral) adalah faktor kunci yang membentuk perilaku negara. Dalam sistem anarki, negara-negara harus mengandalkan diri sendiri untuk menjamin keamanan mereka.
- b. Distribusi Kapabilitas: Waltz berpendapat bahwa distribusi kapabilitas (terutama kekuatan militer dan ekonomi) di antara negara-negara adalah faktor penting dalam sistem internasional.

Perubahan dalam distribusi kapabilitas dapat mengubah struktur sistem dan perilaku negara.

- c. Prinsip *Self-help*: Dalam sistem anarki, negara-negara harus bergantung pada diri sendiri untuk bertahan hidup. Ini mendorong negara-negara untuk selalu berusaha meningkatkan posisi relatif mereka dalam sistem.
- d. *Balance of Power*: Waltz berpendapat bahwa negara-negara cenderung menyeimbangkan kekuatan terhadap ancaman potensial. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapabilitas internal atau membentuk aliansi.
- e. Kepentingan Nasional: Menurut Waltz, kepentingan utama setiap negara adalah kelangsungan hidup. Semua tindakan negara dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan hidup mereka dalam sistem yang anarki.
- f. Perubahan Sistemik: Waltz berpendapat bahwa perubahan dalam sistem internasional terutama disebabkan oleh perubahan dalam distribusi kapabilitas di antara negara-negara utama, bukan oleh faktor-faktor internal negara.

Waltz menekankan bahwa neorealisme adalah teori politik internasional, bukan teori kebijakan luar negeri. Ini berarti bahwa teori ini lebih cocok untuk menjelaskan pola umum perilaku negara dalam sistem internasional, bukan untuk memprediksi tindakan spesifik negara tertentu.

2. Konsep Deterministik Realisme

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Konsep Deterministik Realisme, yang merupakan salah satu varian dari teori neorealisme. Deterministik realisme berpandangan bahwa perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor struktural seperti distribusi kekuatan (*power*) dan posisi negara dalam sistem internasional.

Deterministik realisme merupakan salah satu varian dari teori neorealisme yang berpandangan bahwa perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor struktural seperti distribusi kekuatan (*power*) dan posisi negara dalam sistem internasional. Konsep ini dijelaskan secara mendalam oleh Kenneth Waltz dalam bukunya "*Theory of International Politics*".

Waltz menekankan bahwa struktur sistem internasional yang anarki mendorong negara-negara untuk bertindak secara rasional dalam mengejar kepentingan nasional mereka. Dalam pandangan deterministik realisme, negara-negara tidak memiliki pilihan selain beradaptasi dengan struktur sistem internasional yang ada dan bertindak sesuai dengan insentif dan kendala yang diberikan oleh struktur tersebut. Distribusi kekuatan dalam sistem internasional dianggap sebagai faktor utama yang menentukan perilaku negara. Negara-negara yang memiliki kekuatan besar akan cenderung bersikap lebih asertif dan ekspansif, sementara negara-negara yang lebih lemah

akan cenderung lebih defensif dan berusaha mempertahankan status quo (Waltz, 1979).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan karena berfokus pada analisis mendalam terhadap situasi konflik Rusia-Ukraina berdasarkan data-data sekunder yang tersedia dari berbagai sumber literatur. Menurut Snyder (2019), studi kepustakaan (*library research*) didefinisikan sebagai sebuah metodologi penelitian kualitatif yang melibatkan pencarian sistematis, evaluasi kritis, dan sintesis dari literatur yang sudah ada pada suatu topik penelitian tertentu. Studi kepustakaan dipilih sebagai metode yang tepat karena memungkinkan sintesis dan evaluasi kritis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Jenis Data

Menurut Yin (2018), dalam bukunya "Case Study Research and Applications: Design and Methods", data sekunder didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain di luar kepentingan studi kasus atau penelitian saat ini, dapat berupa catatan atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel berita, dokumen resmi, dan sumber-sumber

kredibel lainnya yang relevan dengan topik penelitian terkait konflik Rusia-Ukraina. Penggunaan data sekunder ini sesuai dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dipilih untuk menganalisis secara mendalam situasi konflik tersebut berdasarkan literatur yang tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh. Metode-metode tersebut adalah:

a. Studi pustaka, menurut Snyder, studi pustaka merupakan metodologi penelitian kualitatif yang sah, sistematis, dan melibatkan pencarian, evaluasi kritis serta sintesis terhadap literatur relevan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan-temuan sebelumnya guna memberikan perspektif baru, membangun model konseptual, memetakan topik secara komprehensif, mengidentifikasi celah penelitian, serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan konflik Rusia-Ukraina.

b. *Internet-based data collection*, menurut Tourangeau, pengumpulan data berbasis internet menawarkan beberapa keuntungan, seperti kemampuan untuk menjangkau populasi yang lebih luas secara geografis, biaya yang lebih rendah dibandingkan survei tradisional, dan kecepatan dalam pengumpulan data. Mereka menyatakan bahwa "survei web telah menjadi metode pengumpulan data yang semakin populer dalam penelitian karena fleksibilitas, efisiensi biaya, dan peluang untuk meningkatkan kualitas data melalui peningkatan kontrol atas lingkungan pengambilan data", dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber online yang kredibel, seperti situs web resmi, basis data, dan portal berita terpercaya mengenai konflik Rusia-Ukraina.

c. *Dokumentasi*, menurut Bowen, analisis dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan proses sistematis untuk menelaah dan mengevaluasi berbagai jenis dokumen, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam menggunakan metode ini, peneliti perlu mempertimbangkan keaslian, kredibilitas, representatifitas, dan makna dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik seperti laporan tahunan, kebijakan pemerintah, catatan rapat, atau surat kabar, maupun dokumen pribadi seperti buku harian, surat, atau email. Penekanan utama dalam analisis dokumen adalah pada bagaimana data yang

terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut terkait dengan konteks tertentu yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen resmi seperti laporan, pernyataan, perjanjian, atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga internasional, atau organisasi terkait dengan konflik Rusia-Ukraina. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif deskriptif yang kaya dan membantu memahami fenomena konflik tersebut secara lebih mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*), menurut Hsieh & Shannon, metode analisis isi merupakan metode penelitian untuk menginterpretasikan makna dari konten data melalui proses klasifikasi sistematis dengan mengidentifikasi tema atau pola tertentu. Data akan dikumpulkan secara kualitatif dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, laporan penelitian, berita, dan dokumen resmi terkait konflik Rusia-Ukraina. Setelah membaca dan mempelajari data secara mendalam, dilakukan coding dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema seperti "perbedaan kekuatan" dan "keberlanjutan konflik" untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, data dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan pendekatan teori neorealisme dan deterministik

realisme. Terakhir, ditarik kesimpulan dan rekomendasi guna memberikan pemahaman komprehensif tentang konflik Rusia-Ukraina serta implikasinya terhadap keamanan regional dan global.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Deterministik Realisme

Konsep deterministik dalam realisme, terutama dalam neorealisme atau realisme struktural, mencerminkan pandangan bahwa perilaku negara-negara di panggung internasional tidak semata-mata ditentukan oleh keputusan subjektif atau preferensi internal negara tersebut, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor struktural yang berada di luar kendali mereka. Dalam teori ini, hubungan internasional dipahami sebagai suatu sistem yang diatur oleh prinsip-prinsip dasar seperti anarki dan distribusi kekuatan antarnegara. Negara-negara, sebagai aktor utama, terikat pada logika yang dihasilkan oleh struktur sistem internasional yang anarkis, yang memaksa mereka untuk bertindak dengan cara tertentu guna menjaga kelangsungan hidup dan kepentingan nasional (Waltz, 1979).

Anarki internasional merupakan elemen sentral dalam neorealisme dan dianggap sebagai struktur penentu yang bersifat deterministik. Anarki, dalam konteks ini, tidak merujuk pada kekacauan atau ketidakteraturan, tetapi pada tidak adanya otoritas sentral atau lembaga internasional yang memiliki otoritas final untuk mengatur hubungan antarnegara. Dalam sistem yang anarkis, negara-negara tidak dapat mempercayai negara lain atau otoritas global untuk melindungi keamanan mereka, sehingga setiap negara harus bergantung pada diri sendiri untuk bertahan hidup (Waltz, 1979). Anarki inilah yang memaksa negara-negara untuk terus berusaha

meningkatkan kekuatan mereka, baik secara militer, ekonomi, maupun politik, guna menghadapi potensi ancaman dari negara lain.

Dalam sistem anarki, keputusan untuk meningkatkan kekuatan sering kali menciptakan dilema keamanan. Dilema keamanan muncul ketika negara A, dalam upayanya untuk meningkatkan keamanan nasional dengan meningkatkan anggaran pertahanan atau membangun aliansi militer, tanpa sengaja memicu kekhawatiran di negara B. Negara B kemudian merespons dengan meningkatkan kekuatannya juga, yang justru memperburuk rasa ketidakamanan negara A, meskipun awalnya tindakan tersebut bersifat defensif (Jervis, 1978). Fenomena ini menunjukkan bagaimana negara-negara terperangkap dalam situasi yang ditentukan oleh logika anarki, di mana tindakan satu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat secara paradoks menghasilkan ketidakamanan lebih lanjut, baik bagi negara tersebut maupun bagi negara-negara lain di sistem internasional. Determinisme dalam realisme terlihat dari kenyataan bahwa negara-negara harus bereaksi terhadap kondisi ini, meskipun niat awal mereka mungkin tidak agresif.

Selain itu, neorealisme juga menekankan pentingnya distribusi kekuatan dalam sistem internasional sebagai determinan utama perilaku negara. Dalam buku *Theory of International Politics*, Waltz (1979) menjelaskan bahwa sistem internasional dapat dikategorikan berdasarkan distribusi kekuatan antarnegara, seperti sistem bipolar, multipolar, atau unipolar. Struktur kekuatan ini menentukan pola interaksi antarnegara.

Dalam sistem bipolar, misalnya, di mana dua negara adidaya saling berhadapan (seperti AS dan Uni Soviet selama Perang Dingin), terdapat keseimbangan kekuatan yang lebih stabil karena masing-masing kekuatan besar cenderung menghindari konfrontasi langsung yang bisa berujung pada kehancuran total (Waltz, 1979). Di sisi lain, dalam sistem multipolar yang melibatkan lebih banyak kekuatan besar, interaksi antarnegara lebih kompleks dan rentan terhadap ketidakstabilan, karena lebih banyak negara yang terlibat dalam mempertahankan atau meraih supremasi.

Distribusi kekuatan ini memiliki efek deterministik karena negara-negara, baik kekuatan besar maupun kecil, harus menyesuaikan perilaku mereka dengan posisi mereka dalam sistem. Kekuatan besar cenderung bersikap proaktif dalam menentukan dinamika sistem internasional, sementara negara-negara yang lebih kecil lebih cenderung mencari perlindungan melalui aliansi atau strategi penyeimbangan kekuatan (*balancing*). Sebagai contoh, negara-negara yang lebih kecil dapat membentuk koalisi untuk menyeimbangkan kekuatan yang lebih dominan, sebagaimana terlihat dalam pembentukan NATO untuk menghadapi Uni Soviet selama Perang Dingin. Dengan demikian, struktur distribusi kekuatan global secara signifikan menentukan arah kebijakan luar negeri negara-negara, di mana mereka memiliki sedikit pilihan selain beradaptasi dengan kondisi ini (Waltz, 1979).

John Mearsheimer, dalam pandangannya mengenai neorealisme ofensif, memperluas konsep determinisme ini dengan menyatakan bahwa

negara-negara besar tidak hanya berupaya menjaga keseimbangan kekuatan, tetapi juga selalu berusaha untuk memaksimalkan kekuatan mereka dan mencapai hegemoni regional. Menurut Mearsheimer (2001), negara-negara besar selalu berada dalam keadaan kompetisi karena tidak ada jaminan bahwa negara lain tidak akan menjadi ancaman di masa depan. Dengan tidak adanya otoritas internasional yang dapat menjamin keamanan jangka panjang, negara-negara besar terpaksa mengejar dominasi regional sebagai satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup. Dalam pandangan ini, perilaku negara tidak sepenuhnya didasarkan pada pilihan bebas, tetapi dipaksa oleh tekanan struktural untuk terus meningkatkan kekuatan dan berupaya menjadi hegemon.

Konsep ini juga memiliki implikasi penting bagi konsep kedaulatan dan kebijakan luar negeri negara-negara. Meskipun negara dipandang sebagai aktor yang berdaulat dan bebas dalam teori hubungan internasional tradisional, neorealisme menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri negara sebagian besar dikondisikan oleh tekanan eksternal. Negara-negara yang mengabaikan dinamika kekuatan global atau gagal menyesuaikan diri dengan distribusi kekuatan dalam sistem internasional cenderung rentan terhadap ancaman eksternal dan bahkan kehancuran. Dalam hal ini, realisme bersifat deterministik karena mengandaikan bahwa negara-negara hanya dapat bertahan dengan mengikuti logika struktural yang ada (Waltz, 1979).

Dengan demikian, konsep deterministik realisme, terutama neorealisme, menekankan bahwa perilaku negara-negara di sistem internasional tidak sepenuhnya otonom, tetapi sangat dibatasi oleh struktur yang ada. Anarki, distribusi kekuatan, dan dilema keamanan menciptakan kondisi yang memaksa negara-negara untuk bertindak sesuai dengan logika tertentu, di mana prioritas utama mereka adalah memastikan keamanan dan kelangsungan hidup. Negara-negara tidak memiliki banyak pilihan dalam hal kebijakan luar negeri mereka, karena struktur sistem internasional membatasi ruang gerak mereka dan memaksa mereka untuk bereaksi terhadap ancaman dan peluang yang muncul dari distribusi kekuatan global (Mearsheimer, 2001; Waltz, 1979).

B. Teori Neorealisme

Teori neorealisme, yang juga dikenal sebagai realisme struktural, merupakan salah satu pendekatan dominan dalam studi hubungan internasional. Teori ini diperkenalkan oleh Kenneth Waltz dalam karyanya yang berjudul *Theory of International Politics* pada tahun 1979. Neorealisme berkembang dari teori realisme klasik, tetapi berbeda dalam penekanannya pada struktur sistem internasional sebagai determinan utama perilaku negara, bukan pada sifat manusia (Waltz, 1979).

Menurut neorealisme, sistem internasional bersifat anarki, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang mengatur interaksi antarnegara. Negara-negara, sebagai aktor utama, harus bertahan hidup dalam lingkungan yang tidak teratur dan penuh dengan potensi ancaman. Karena

itu, setiap negara harus bergantung pada dirinya sendiri untuk memastikan keamanan dan kelangsungan hidupnya. Dalam kondisi ini, neorealisme melihat distribusi kekuatan dalam sistem internasional sebagai faktor kunci yang memengaruhi perilaku negara (Waltz, 1979). Neorealisme menekankan pentingnya keseimbangan kekuatan sebagai cara negara-negara mengelola ketidakpastian yang timbul dari sifat anarkis sistem internasional (Mearsheimer, 2001).

Dalam teori ini, fokus utama adalah pada struktur, bukan pada perilaku individual negara atau sifat pemimpinnya. Waltz berpendapat bahwa perilaku negara lebih ditentukan oleh posisi mereka dalam sistem internasional daripada oleh karakteristik internal negara tersebut. Artinya, negara bertindak berdasarkan logika struktural yang memaksa mereka untuk mengutamakan kepentingan nasional dan keamanan. Struktur sistem internasional ditentukan oleh dua elemen utama: anarki dan distribusi kekuatan antarnegara. Dengan demikian, negara-negara besar cenderung memainkan peran dominan dalam menciptakan stabilitas atau ketidakstabilan di dalam sistem internasional (Waltz, 1979).

Teori neorealisme terbagi menjadi dua cabang utama: neorealisme defensif dan neorealisme ofensif. Neorealisme defensif, yang dipelopori oleh Waltz, berpendapat bahwa negara-negara mencari keamanan dalam batas tertentu dan tidak berupaya mencapai dominasi global karena perilaku semacam itu akan menyebabkan negara lain bereaksi dengan aliansi untuk melawan negara yang terlalu kuat (Waltz, 1979). Di sisi lain,

neorealisme ofensif, yang dikembangkan oleh John Mearsheimer, menyatakan bahwa negara-negara besar selalu mencari peluang untuk memaksimalkan kekuatan mereka dan mencapai hegemoni regional demi memastikan kelangsungan hidupnya di bawah kondisi anarki (Waltz, 1979).

Neorealisme juga memperkenalkan konsep "dilema keamanan" (*security dilemma*), di mana tindakan satu negara untuk meningkatkan keamanannya sering kali dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga memicu perlombaan senjata atau peningkatan ketegangan (Jervis, 1978). Negara-negara terpaksa bertindak untuk memastikan keamanan mereka, meskipun tindakan tersebut dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan berupa meningkatnya ketidakamanan global.

Dalam kajian neorealisme, peran aktor non-negara atau isu-isu internal negara tidak mendapat perhatian besar. Negara tetap dilihat sebagai aktor rasional yang bertindak secara egois untuk menjaga kepentingan nasional mereka dalam lingkungan internasional yang penuh ketidakpastian. Pada akhirnya, teori ini berupaya menjelaskan dinamika kekuasaan di antara negara-negara besar serta bagaimana mereka berusaha mempertahankan keseimbangan kekuatan dalam menghadapi ancaman eksternal (Mearsheimer, 2001; Waltz, 1979).

C. Neorealisme dan Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Ukraina

Kebijakan luar negeri Rusia, khususnya terhadap Ukraina, telah menjadi fokus perhatian yang signifikan dalam kajian hubungan

internasional, terutama setelah peristiwa-peristiwa penting seperti aneksasi Krimea pada tahun 2014. Salah satu penelitian yang memberikan analisis mendalam mengenai dinamika ini adalah artikel oleh Elias Götz (2016) yang berjudul "*Neorealism and Rusia's Ukraine policy, 1991–present*". Dalam artikel ini, Götz mengemukakan argumen-argumen kunci yang menjelaskan bagaimana teori neorealisme dapat digunakan untuk memahami perilaku Rusia dalam konteks kebijakan luar negerinya terhadap Ukraina (Götz, 2016).

Götz memulai dengan menegaskan bahwa neorealisme, yang berfokus pada kekuatan dan kepentingan nasional, memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis kebijakan Rusia. Ia berpendapat bahwa Rusia, sebagai kekuatan besar regional, memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan pengaruhnya di Ukraina, yang dianggap sebagai bagian integral dari lingkup pengaruhnya. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Ukraina telah menjadi arena persaingan antara Rusia dan Barat, terutama Uni Eropa dan NATO. Dalam konteks ini, Götz menunjukkan bahwa Rusia berusaha untuk mengendalikan orientasi kebijakan luar negeri Ukraina agar tidak berpaling ke arah Barat, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya.

Salah satu kontribusi penting dari penelitian Götz adalah penekanan pada penggunaan alat kekuatan lunak dan keras oleh Rusia. Ia menjelaskan bahwa Rusia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomatik dan ekonomi untuk

mencapai tujuannya. Misalnya, selama masa kepresidenan Viktor Yanukovych, Rusia menerapkan strategi kekuatan lunak dengan menawarkan insentif ekonomi, seperti penghapusan utang dan harga energi yang menguntungkan, untuk menarik Ukraina lebih dekat ke dalam pengaruhnya. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman Götz bahwa kekuatan lunak dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun pengaruh di negara-negara tetangga.

Namun, Götz juga mencatat bahwa ketika tekanan eksternal dari institusi Barat meningkat, Rusia cenderung beralih ke tindakan yang lebih agresif. Ia mengamati bahwa aneksasi Krimea pada tahun 2014 merupakan puncak dari strategi ini, di mana Rusia merespons dengan kekuatan militer untuk memastikan bahwa Ukraina tidak beralih ke arah Barat. Götz berargumen bahwa tindakan ini tidak hanya mencerminkan ambisi Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya, tetapi juga merupakan reaksi terhadap apa yang dianggapnya sebagai ancaman eksistensial dari ekspansi NATO dan Uni Eropa ke arah timur.

Selain itu, Götz mengkritik teori neorealisme yang ada karena tidak sepenuhnya menjelaskan beberapa perilaku tertentu, seperti aneksasi Krimea. Ia mengusulkan agar konsep "kapasitas negara" dimasukkan dalam analisis, karena hal ini mempengaruhi kemampuan Rusia untuk merespons rangsangan geopolitik secara efektif. Dalam konteks ini, Götz menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor domestik yang

dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, termasuk stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri Rusia.

Götz juga mengajak para peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri Rusia dengan membandingkannya dengan kebijakan negara-negara besar lainnya di berbagai waktu dan tempat. Dengan melakukan perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang membuat kebijakan Rusia di kawasan pasca-Soviet ini unik, serta apa yang mungkin menjadi kesamaan dengan kebijakan negara-negara besar lainnya.

Secara keseluruhan, penelitian Götz memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi di balik tindakan Rusia di Ukraina, dengan mengintegrasikan wawasan teoretis dan observasi empiris dari lanskap geopolitik di kawasan tersebut. Penelitian ini menjadi landasan penting bagi studi lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri Rusia dan dampaknya terhadap stabilitas regional, serta membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana teori neorealisme dapat diterapkan dan disesuaikan dengan konteks yang berbeda.